

Penulis:
Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP.



MODERASI BERAGAMA DI DESA



Editor:
Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
Dr. Yayan M. Royani, S.H.I., M.H.

MODERASI BERAGAMA DI DESA

Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP.



MODERASI BERAGAMA DI DESA

Penulis:

Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.

Dr. Yayan M. Royani, S.H.I., M.H.

ISBN:

978-623-459-773-8

Cetakan Pertama:

Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Moderasi Beragama di Desa” sesuai dengan rencana awal. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat hingga kepada umat Beliau sampai akhir zaman.

Buku ini mengkaji mengenai penerapan moderasi beragama di desa yang mana banyak desa saat ini dihuni oleh masyarakat yang heterogen, sehingga dalam proses perkembangannya menjadi penting untuk membangun nilai-nilai pemersatu yang mampu merangkul semua masyarakat dari latar belakang yang berbeda untuk kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, serta bersama-sama bergotong-royong dalam menyukseskan pembangunan desa guna mewujudkan tatanan masyarakat madani yang harmonis, inklusif, adaptif, moderat dan berperadaban.

Buku ini dibiayai melalui skema Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Kementerian Agama Republik Indonesia, Satker UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Rektor dan Para Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung beserta dengan jajarannya, kepada para informan baik dari unsur akademisi, unsur pemerintah, maupun unsur masyarakat yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam keseluruhan proses penelitian dan penulisan buku ini.

Harapan dari adanya buku ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam menyusun kerangka pengembangan desa-desa yang berbasis pada nilai-nilai moderasi beragama, sehingga upaya membangun desa yang harmonis, inklusif, adaptif dan moderat dalam bingkai heterogenitas masyarakat dapat terwujud sesuai dengan harapan bersama.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik membangun senantiasa penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu, khususnya mengenai konsep moderasi beragama dan bagi para pembaca yang budiman.

Oktober, 2023

Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 DESA DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA	1
A. Paradigma Moderasi Beragama di Desa.....	2
B. Konstruksi Moderasi Beragama Melalui Nilai dan Budaya Lokal di Desa	5
C. Elaborasi Moderasi Beragama Melalui Nilai dan Budaya Lokal di Desa	9
BAB 2 MENEMUKENALI KEBERAGAMAN DI DESA	23
A. Entitas Desa	24
B. Tingkat Keberagaman Desa	31
C. Agama dan Aliran Keagamaan di Desa	34
BAB 3 NILAI STRATEGIS MODERASI BERAGAMA DI DESA	45
A. Nilai Strategis Moderasi Beragama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	46
B. Nilai Strategis Moderasi Beragama dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	53
C. Nilai Strategis Moderasi Beragama dalam Pembangunan Masyarakat Madani	63
BAB 4 AKTOR-AKTOR DALAM PENERAPAN MODERASI BERAGAMA	79
A. Pemerintah Desa	80
B. Tokoh Masyarakat	87
C. Kader Penggerak Masyarakat Desa	99
BAB 5 BENTUK SIKAP DAN PERILAKU BERBASIS MODERASI BERAGAM	107
A. Bentuk Sikap dan Perilaku Tingkat Individu	108
B. Bentuk Sikap dan Perilaku Tingkat Masyarakat	112
C. Bentuk Sikap dan Perilaku Tingkat Pemerintah Desa.....	117
BAB 6 MANFAAT MODERASI BERAGAMA DI DESA	125
A. Manfaat Dalam Lingkup Individu.....	126
B. Manfaat Dalam Lingkup Masyarakat.....	130
C. Manfaat Dalam Lingkup Pemerintah Desa.....	135
DAFTAR PUSTAKA	142
PROFIL PENULIS	154



DESA DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama dalam konteks desa melalui kajian ini tidak diposisikan sebagai suatu nilai baru yang dalam tahap awal coba diterapkan oleh institusi pemerintah desa, sehingga nilai-nilai moderasi beragama akan terlembagakan dalam instrumen kebijakan secara *top-down* yang mana para pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi bagian dari aktor kebijakan moderasi beragama yang terikat dengan kedudukan dan perannya masing-masing.

Hal ini dilakukan selain menghindari biasanya pengukuran hasil pelaksanaan kebijakan yang belum tentu memiliki kejelasan *output*, *outcome*, serta dampak kebijakannya, juga dilakukan untuk menghindari distorsi nilai-nilai moderasi beragama yang hanya akan menjadi norma-norma formal semata, padahal nilai dan budaya di desa sejak dahulu dibentuk melalui interaksi sosial asosiatif dari masyarakat yang melahirkan kesepahaman komunal yang disepakati untuk dipraktikkan secara bersama-sama.

Moderasi beragama sekalipun memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan di berbagai tempat, namun dalam konteks desa penerapannya akan dihadapkan kepada batasan ruang, waktu dan dimensi lokal desa. Didasarkan pada pemahaman tersebut, penyajian elaborasi nilai-nilai universal moderasi beragama melalui nilai dan budaya lokal yang telah tumbuh dan berkembang menjadi kearifan lokal di desa menjadi solusi untuk diadopsi dalam penerapan moderasi beragama di desa, hal ini didasarkan pada alasan bahwa memasukkan nilai-nilai moderasi beragama sebagai sebuah konsep universal yang utuh dan baru tidak hanya akan membuka peluang perdebatan di tingkat desa, tetapi juga peluang adanya penolakan,



BAB
2

MENEMUKENALI KEBERAGAMAN DI DESA

Desa awalnya dibentuk dalam satuan kelompok kecil dengan karakteristik yang homogen, seiring dengan perkembangan zaman, desa banyak mengalami perubahan yang mana banyak desa bertransformasi menjadi suatu entitas dari masyarakat heterogen baik dari latar belakang asal-usul, mata pencaharian, tingkat pendidikan sampai pada agama yang dianut. Heterogenitas ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan yang mana kesemuanya itu menunjukkan bahwa desa telah, sedang dan akan berdinamika sebagai dampak dari tuntutan internal dan eksternal desa yang pada akhirnya mengubah desa menjadi lebih beragam dalam berbagai aspek kehidupan (Jamaludin, 2015; Murdiyanto, 2008).

Para peneliti mengambil perspektif berbeda tentang desa, mulai dari melihat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, melihat desa sebagai lokalitas sosial dan budaya, melihat desa sebagai entitas masyarakat yang memiliki *local genius*, sampai pada melihat desa sebagai *local self government* yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Kajian desa yang luas dari berbagai perspektif menunjukkan bahwa desa sebagai entitas yang berdimensi ganda, mulai dari kesatuan masyarakat yang memiliki nilai dan budaya lokal, sampai pada sebagai kesatuan masyarakat berpemerintahan yang memiliki struktur birokrasi. Didasarkan pada pemahaman tersebut, maka kajian-kajian yang memfokuskan pada studi perdesaan tidak akan bisa dilepaskan dari 2 (dua) dimensi tersebut, termasuk di dalamnya kajian mengenai moderasi beragama di desa, maka akan secara langsung berkaitan dengan nilai dan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam membentuk struktur sosial desa (entitas



NILAI STRATEGIS MODERASI BERAGAMA DI DESA

Adopsi moderasi beragama dalam konteks desa memiliki nilai strategis yang tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penerapan nilai-nilai moderasi beragama secara optimal di desa tidak hanya akan mampu mewujudkan struktur sosial yang akomodatif terhadap heterogenitas masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan pemerintahan desa yang terbuka, egaliter, inklusif, serta mampu mewujudkan pembangunan desa yang terbuka dan partisipatif.

Peran strategis moderasi beragama di desa diharapkan mampu menjadi bagian dari proses pengembangan desa ke arah yang lebih baik, sehingga desa dengan segala dinamika yang ada di dalamnya dapat menjadi entitas heterogen yang harmonis yang diharapkan bisa mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang terbuka, egaliter dan inklusif.

Upaya menempatkan moderasi beragama secara strategis dalam perkembangan desa dapat dilakukan secara terpadu mulai dari membangun tata kehidupan masyarakat sampai dengan membangun tata pemerintahan desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan di satu sisi masyarakat desa selama ini menjadi bagian dalam pembentukan entitas yang ada di desa, di sisi lain dalam konteks pemberlakuan undang-undang desa, pemerintah desa diposisikan secara strategis sebagai birokrasi di tingkat lokal yang memiliki hak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.



AKTOR-AKTOR DALAM PENERAPAN MODERASI BERAGAMA

Aktor dalam konteks desa diartikan sebagai orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan di desa yang mana aktor-aktor tersebut memiliki kedudukan atau posisi tertentu baik dalam struktur formal maupun dalam struktur informal desa (Dwinugraha, 2017; Gunadi et al., 2020; Wirasandi, 2018). Aktor-aktor dalam struktur desa yaitu mereka yang berhasil menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, sehingga mereka memiliki kecakapan dan kualitas sebagaimana tuntutan dari kedudukan dalam struktur yang ada di desa tersebut.

Aktor-aktor dikaitkan dengan struktur politik dan pemerintahan diartikan sebagai relasi antara yang memerintah dengan yang diperintah, sehingga memunculkan sekelompok kecil orang yang memerintah masyarakat. Lebih lanjut, aktor berkenaan dengan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki untuk mempengaruhi masyarakat (Asri, 2013; A. P. Ramadani & Nasiwan, 2022; Sandy, 2020).

Kedudukan aktor dibagi menjadi 2 (dua) kelas, yaitu: *Pertama*, aktor yang memiliki kekuasaan dan kewenangan memerintah atau menduduki jabatan dalam struktur organisasi pemerintah. *Kedua*, lapisan lebih rendah, yaitu non-aktor yang mana mereka tidak memiliki kewenangan kekuasaan atau kewenangan dalam pemerintahan, aktor-aktor ini antara lain yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama (Hutabarat, 2019; Zuhro, 2009).

Aktor-aktor dalam konteks desa sebagaimana secara konseptual dijelaskan di atas, maka dapat dibagi ke dalam 2 (dua), yaitu: *Pertama*, aktor yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa (Astika & Sri Subawa, 2021;



BENTUK SIKAP DAN PERILAKU BERBASIS MODERASI BERAGAMA

Praktik perilaku berbasis nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks penyelenggaraan kehidupan di desa tidak hanya akan mampu memberi dampak positif bagi terciptanya kehidupan harmonis antar sesama masyarakat, tetapi juga mampu menjadi katalisator pembangunan desa yang tengah dilaksanakan yang mana berbagai program pembangunan desa akan dapat diselenggarakan dengan baik karena adanya dukungan lingkungan masyarakat yang kondusif, konstruktif dan partisipatif.

Penerapan moderasi beragama dalam konteks penyelenggaraan kehidupan desa juga akan mampu membangun struktur sosial desa yang terbuka, dinamis dan inklusif yang ditunjukkan dengan adanya kesetaraan, pengakuan keberagaman, saling menghormati dan menghargai melalui tindakan komunal masyarakat desa. Hal ini akan berimplikasi pada adanya kesinambungan antara nilai-nilai moderasi beragama dengan nilai dan budaya lokal desa yang telah terbentuk dalam struktur sosial desa, sehingga masyarakat akan mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut.

Setiap unsur yang ada di desa memiliki peran untuk turut serta dalam penerapan moderasi beragama di desa sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang berbasis moderasi beragama merupakan bukti komitmen akan relevansi nilai-nilai moderasi beragama dengan penyelenggaraan kehidupan yang ada di desa. Sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama harus mampu diwujudkan dalam semua tingkatan yaitu dalam tingkat individu, tingkat masyarakat dan tingkat pemerintah desa secara kolektif,



MANFAAT MODERASI BERAGAMA DI DESA

Penerapan moderasi beragama merupakan usaha kolektif yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di desa yang mana hal ini dilandasi keinginan untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan bermasyarakat di desa. Hal ini menjadi wajar dikarenakan desa selama ini menjadi entitas yang selalu merefleksikan kehidupan saling menghargai dan menghormati antara sesama warga masyarakat, sehingga penerapan moderasi beragama di desa merupakan bentuk perwujudan dari komitmen berbagai pihak untuk tetap menjaga kondusifitas lingkungan desa. Lebih lanjut, hal ini juga didasarkan atas kondisi desa saat ini yang mana banyak desa menjadi entitas masyarakat yang heterogen dikarenakan adanya mobilitas penduduk dan faktor-faktor lainnya yang menuntut struktur sosial yang ada di desa untuk bersifat terbuka, dinamis dan inklusif.

Terwujudnya moderasi beragama di desa harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha penerapan moderasi beragama, pihak-pihak tersebut merupakan aktor yang secara aktif menerapkan nilai-nilai moderasi beragama sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing.

Manfaat penerapan moderasi beragama apabila diuraikan ke dalam aktor penerima manfaat penerapan moderasi beragama, maka setidaknya dapat dibagi ke dalam 3 (tiga), yaitu: *Pertama*, warga masyarakat sebagai individu yang secara mandiri melalui pengetahuan dan pemahamannya turut aktif menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. *Kedua*, masyarakat sebagai entitas komunal yang telah berusaha membangun relasi sosial di antara sesama warga masyarakat yang dilandaskan pada nilai-nilai moderasi beragama. *Ketiga*, pemerintah desa yang melalui perannya sebagai birokrasi publik di tingkat lokal telah membuat berbagai agenda penyelenggaraan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, M. (2019). Moderasi Beragama untuk Indonesia yang Damai. *Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*, 33–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/sn.v0i2.13>
- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 242–253. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1509>
- Agusta, I. (2007). Indonesia dalam Pertautan Budaya Pembangunan dan Budaya Warga Desa. *Jurnal Wacana*, 9(2), 135–153.
- Ahmad, M., Giyoto, G., & Santoso, R. B. (2021). Manajemen Pengembangan Karakter Muslim Moderat Pada Siswa Madrasah Aliyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 475–483. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2290>
- Ahmadin. (2017). Konflik Sosial Antar Desa dalam Perspektif Sejarah di Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(1), 224–232.
- Aji, A. B., & Chandra Sari, K. D. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 596–613. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art7>
- Alhafizh, M. F., Effendi, C., Musthofa, R. F., & Najmura, T. A. (2021). Kaitan Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh dengan Sila KE-3 Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Falsafah Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 671–680.
- Amalia, N., Siagian, N., Riani, L., Faradila, I., Wulandari, N., & Rambe, U. K. (2021). Keaktifan Gotong Royong Berpengaruh Meningkatkan Interaksi Sosial dan Menumbuhkan Rasa Solidaritas di Desa Siamporik. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 75–80. <https://ummaspul.ejournal.id/maspuljr/article/view/2052>
- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Andi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Andika, T. (2013). Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia. *Madania*, XVII (1), 39–52.
- Anggraini, C., Ritonga, D. H., Kristina, L., Syam, M., & Kustiawan, W. (2022). Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 1(3), 337–342.

- Angkasawati. (2015). Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung*, 8(1), 23.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta.
- Asri, S. (2013). Aktor Politik Kontemporer Dalam Perspektif Psychocultural. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a>
- Astawa, I. N. T. (2016). Fungsi dan Peran Keragaman Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional. *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu*, 19(1), 52–58.
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 223–232.
<https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Administrasi Dan Kebijakan*, 3(1), 1–6.
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Collaborative Governance Strategy In Government Sector. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196–210.
- Budiana, H. R., Bajari, A., & Mulyawan, R. (2020). Transformasi Nilai Sabilulungan dalam Aktivitas Komunikasi Pelayanan Publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 42–56. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.23768>
- Cahyono, H. (Ed.). (2005). *Konflik Elit Politik Pedesaan di Indonesia*. Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Depict Pristine Adi, & Amalia, A. F. (2022). Toleransi Beragama Dalam Praktek Sosial Masyarakat Mayoritas dan Minoritas Agama Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 3(1), 52–60.
<https://doi.org/10.22515/isnad.v3i1.5273>
- Diana, R. (2015). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. *Jurnal Istinbath*, XIV (15), 89–103.
- Dianto, I. (2018). Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 18(2), 239–258.
<https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2829>
- Djohani, R. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM).
- Djumiarti, T. (2013). Peran Budaya Birokrasi dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 71–77.

- Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1421>
- Eko, S. (2006). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa* (S. Eko (Ed.); 1st ed.). Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fachrudin, T. (2021). *Apropriasi Budaya Suku Banjar dalam Gaya Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor*. 10(2), 120–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/bk.v10i2.31685>
- Faishal, M. (2007). Institutionalisation of Democracy Deliberative in Indonesia: A Search for Theory. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 1–30.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Wedana: Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 11(1), 200–209.
- Febriyandi, Y. S., F. (2019). Agama, Ritual dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Umat Beragama di Indonesia. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 123–142. <https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.41>
- Firdaus, M. A. (2014). Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 13(3), 165–174.
- Fithriyana, E. (2019). Menumbuhkan Sikap Empati Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Sekolah Berasrama. *Al Ulya : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 42–54. <https://doi.org/10.36840/ulya.v4i1.210>
- Fitriani, Y., & Agung, I. M. (2018). Religiusitas Islami dan Kerendahan Hati dengan Pemaafan pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 165–172. <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.6418>
- Ghozali, D. A. (2015). *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Gunadi, H. F. F., Sjaf, S., & Kolopaking, L. M. (2020). Pengaruh Aktor Lokal Dominan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 08(03), 152–166.

- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19–30.
- Hamyana, & Romadi, U. (2017). Pembangunan Dan Konflik Sosial Di Masyarakat Desa (Studi Etnografi Implementasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur). *Jurnal Sosial Dan Kebijakan Pertanian*, 6(2), 108–119.
- Hamzah, R. E., & Putri, C. E. (2020). Mengenal dan Mengantisipasi Hoax di Media Sosial pada Kalangan Pelajar. *Jurnal Abdi MOESTOPO*, 3(01), 9–12.
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/abdimoestopo/article/viewFile/1361/683>
- Hanafi, A. A., Rosadi, I., Imam, I. K., Sari, R. I., & Hidayat, Y. (2022). Strategi Guru dalam Menumbuhkan Sikap Moderat di Madrasah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 149–155.
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 227–246.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi *Good Governance* Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
- Hasibuan, S. (2000). *Sumber Daya Manusia: Pendekatan Non Sekuler*. Muhammadiyah University Press.
- Hasibuan, Z. (2018). Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12(2), 183–203.
<https://www.google.co.id/amp/isparmo>.
- Herdiana, D. (2018). *Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Participatory Development Planning (Studi di Desa Dayeuh Luhur Kabupaten Sumedang, Desa Kertawangi dan Desa Jayamekar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2017)*. Universitas Padjadjaran.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(1), 280–301.
- Hikmatulloh, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 457–565.
- Hutabarat, Y. R. P. (2019). *Aktor Politik dan Kampanye Politik (Studi Atas Kegagalan Caleg Pertahana Dalam Pileg DPRD Kota Depok Tahun 2014* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49350/1/YASSER RESKY PRATAMA HUTABARAT.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49350/1/YASSER%20RESKY%20PRATAMA%20HUTABARAT.FISIP.pdf)

- Ian, A. (2017). Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 46–62.
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Publica Press.
- Istikomah, E., & Hardiyanto, H. (2021). Tapa Salira (Tenggang Rasa) dalam Konteks Perdamaian Dunia. *Kejawen*, 1(2), 139–149.
- Iwan, I. (2020). Merawat Sikap Sopan Santun Dalam Lingkungan Pendidikan. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 98–121. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i1.6258>
- Jais, A. (2020). Sekte Keagamaan di Lingkungan Pengikut Kristiani (Studi Tentang Sejarah dan Ajaran Saksi-Saksi Yehuwa di Kota Bandung). *Tsaqôfah: Jurnal Agama Dan Budaya*, 18 (2), 129–152.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. CV. Pustaka Setia.
- Jamrah, S. A. (2014). Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam. *Toleransi*, 6(2), 223–240.
- Jumanah. (2015). Menyembuhkan Penyakit Birokrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Niagara*, VII(1), 59–70.
- Kadir, M. Y. A. (2017). Penyelesaian Konflik Berbasis Desa di Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosorejo, Jawa Tengah). *PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 161–180. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a9>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kenedi, J. (2018). Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan di Indonesia. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2139>
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kibtiyah, M., & Erna, S. (2023). Sikap Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama Antar Umat Beragama dalam Mewujudkan Nilai Moderasi Beragama pada Pemuda Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. *SEULANGA: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 2(1), 27–39.
- Koentjaraningrat. (1984). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Tiara Wacana.

- Kurniasih, D. (2017). Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung. *Jurnal Transformative*, 3(1), 1–15.
- Laeli, I. N. (2022). Aplikasi, Dampak dan Universalitas Sikap Tawadhu'. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 33–46. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.11955>
- Laha, M. S., & Dorohungi, R. (2021). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Governance and Politics (JGPP)*, 1(1), 27–36.
- Levis, L. R. (2021). *Komunikasi Penyuluhan Pedesaan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Linda, I. (2019). Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 231–240.
- Listyawati, A. (2022). Rindu Sejahtera: Wujud Kepedulian dalam Pelayanan Sosial Masyarakat. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(1), 58–73.
- Maharani, G. N. (2020). Komunikasi Interpersonal Dalam Interaksi Sosial Pada Remaja Pecandu Games. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(4), 310–316. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ilkom/article/view/16958/16376>
- Mahmud, A. (2021). Akhlak dan Ego (Dalam Individu, Masyarakat dan Kebangsaan). *Sulesana*, 15(1), 29–40. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/23597>
- Manginsela, E. P. (2015). Struktur Masyarakat Dan Kepemimpinan: Kasus Pedesaan Di Jawa. *Agri-Sosioekonomi*, 11(1), 18–27. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.11.1.2015.7167>
- Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. *Society*, 8(2), 802–812. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.262>
- Marlian, S., & Sari, D. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 208–227. <https://doi.org/10.25077/jakp.5.2.208-227.2020>
- Marsaid. (2016). Islam dan Kebudayaan: Wayang Sebagai Media Pendidikan Islam di Nusantara. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 4(1), 101–130. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/kon/article/view/132>
- Martunus, Z. I., Netriwati, N., Pratiwi, D. D., & Nendra, F. (2020). Analisis Kecakapan Berpikir Rasional: Dampak Dari Penerapan Metode Socrates

- dan Kecerdasan Majemuk Siswa. *AdMathEdu : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika Dan Matematika Terapan*, 10(2), 145–154. <https://doi.org/10.12928/admathedu.v10i2.15899>
- Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech: Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83–95. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5722>
- May, J. (2011). *Psychological Egoism*. Iep.Utm.Edu. <https://iep.utm.edu/psychological-egoism/>
- Muh Ilham Usman. (2020). Paham dan Aliran Akidah Dalam Islam. *Al-Mutsala*, 2(2), 118–139. <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i2.38>
- Muqoddas, M. F. (1996). Konsep Ego Manusia menurut Iqbal: Sebuah Dialektika Pemikiran Filsafat Manusia. *Jurnal Filsafat*, 38–52.
- Murdiyanto, E. (2008). *Sosiologi Perdesaan: Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Muzaqqi, F. (2012). Musyawarah Mufakat: Gagasan dan Tradisi Genial Demokrasi Deliberatif di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 1(2), 21–30. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-21-30> Fahrul Muzaqqi.pdf%0Ahttp://www.neliti.com/
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Nagel, S. S. (1998). *Public Policy Evaluation Making Super-Optimum Decisions* (1st Edition). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429449574>
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Nastiti, Sudalhar, & Fasluky Nurillah. (2020). Pengaruh Pelayanan Prima A6 (Attitude, Attention, Action, Ability, Appearance, Accountability) Terhadap Kepuasan Pasien Di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Kabupaten Lamongan. *JHS: Journal Hospital Science*, 3(1), 50–57.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Nubu, A., & Ihsan Mattalitti, M. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 1(2), 77–99. <https://doi.org/10.51454/parabela.v1i2.451>
- Nugraha, I. G. M. B., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal*

- Interpretasi Hukum*, 2(3), 584–589.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4141.584-589>
- Nuridin, A. H. M. (2018). Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1–17.
- Pamungkas, I. M., & Muslikah, M. (2019). Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dan Empati Dengan Altruisme Pada Siswa Kelas XI MIPA SMAN 3 Demak. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 154–167.
<https://doi.org/10.22373/je.v5i2.5093>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Permatasari, D. (2022). *Apa itu Pelayanan Prima?* Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/15009/Apa-itu-Pelayanan-Prima.html>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Pratiwi, S. P., Kagungan, D., & Sulistio, E. B. (2020). Strategi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(3), 311–319.
<https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i3.45>
- Puspita, D. (2018). Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2016). *Jom Fisip*, 5(2), 1–23.
- Rafinzar, R., Kismartini, & Astuti, R. S. (2021). Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan). *Jurnal MODERAT*, 7(3), 429–450.
<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2479/1886>
- Rahardjo. (2014). *Sosiologi Pedesaan*. Universitas Terbuka.
- Rahawarin, Y. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(6), 71–77.
- Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 1–18.
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(3), 30–43.
<https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>

- Rahmatiani, L. (2016). Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.36805/civics.v1i1.30>
- Ramadani, A. P., & Nasiwan. (2022). Peran Aktor Politik Lokal Memperkuat Civil Society di Kabupaten Kotawaringin Barat. *AGORA: Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(05), 623–635.
- Ramadani, G., Juarsa, O., & Noperman, F. (2021). Hubungan Kecerdasan Moral dengan Sikap Sopan Santun Siswa Kelas Tinggi SDN Gugus I Kota Bengkulu. *JURIDIKDAS: Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 3(2), 154–161. <https://doi.org/10.33369/juridikdas.3.2.154-161>
- Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). *Pelebagaian Demokrasi melalui Musyawarah Desa*. Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Rusfiana, Y., & Sukarno, D. (2022). *Pengembangan Organisasi Pemerintahan* (M. N. Lestar (Ed.)). Elfatih Media Insani.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasinya*. Graha Ilmu.
- Sabli, M. (2015). Aliran-Aliran Teologi dalam Islam (Perang Shiffin dan Implikasinya Bagi Kemunculan Kelompok Khawarij dan Murjiah). *Nur El-Islam*, 2(1), 105–112. <https://media.neliti.com/media/publications/226415-aliran-aliran-teologi-dalam-islam-perang-3369cd4a.pdf>
- Sadzali, A. (2020). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341–375. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama RI.
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Lex Administratum*, 3(2), 24–32.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Penerbit Aksara Timur.
- Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 415–422.
- Saputri, A., & Rachmatan, R. (2016). Religiusitas Dengan Gaya Hidup Hedonisme: Sebuah Gambaran Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Psikologi*, 12(2), 59–67. <https://doi.org/10.24014/jp.v12i2.3230>
- Setianingsih, E. S. (2018). Wabah Gaya Hidup Hedonisme Mengancam Moral Anak. *Malih Peddas (Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar)*, 8(2), 139–150. <https://doi.org/10.26877/malihpeddas.v8i2.2844>

- Shofaussamawati, S. (2018). Iman dan Kehidupan Sosial. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3133>
- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Solihah, A. (2021). Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Masyarakat Di Desa Giriharja Kecamatan Cipanas Lebak-Banten. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1), 89–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/lbrmasy.v7i1.4309>
- Subagyo. (2012). Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong Royong dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1), 61–68.
- Sudjana, S. (2018). Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 135–151. <https://doi.org/10.22146/jkn.33573>
- Suharto, D. G. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 153–160. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.153-160>
- Suparmini, & Wijayanti, A. T. (2015). *Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis)*. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://staffnew.uny.ac.id/upload/198608172014042001/pendidikan/bahan-ajar-masy-kota-desa.pdf>
- Susanto, M. Y., Mumpuni, A. D., & Fadhilah, I. N. (2019). Pengembangan Pola Pikir Rasional dan Objektif dalam Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Scientific. *Buletin Literasi Budaya Sekolah*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.23917/blbs.v1i1.9302>
- Suwarno, Syah, P., & Wibisono, D. (2022). Makna dan Fungsi Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1), 290–323.
- Syahriwana, Nurwaliyuni, S., & Nas, J. (2014). Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 27–34.
- Syamaun, S. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Sikap dan Perilaku Keberagaman. *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 81–95.

- Takdir, M. (2017). Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom (Potret Harmonisasi Kebhinekaan di Nusa Tenggara Timur). *Jurnal TAPIS*, 1(1), 61–83.
- Thalib, M. D. (2022). Konsep Iman, Akal dan Wahyu dalam Al-Qur'an. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 9–29. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v20i1.2661>
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2), 323–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Toha, S. (2011). *Penelitian Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Empirik di Bali)*.
- Tsauri, S. (2015). *Pendidikan Karakter: Peluang dalam Membangun Karakter Bangsa* (A. Mutohar (Ed.)). IAIN Jember PRes.
- Ubaid, A. (2019). *Perilaku Toleran dan Menghargai Perbedaan*. Kemdikbud.Go.Id. <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/PerilakuToleransi-BB/Topik-1.html>
- Ulimaz, M., & Jordan, N. A. (2019). Tipologi Struktur Sosial Masyarakat Kampung Tradisional Atas Air Manggar Dalam Penggunaan Ruang Permukiman Nelayan. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(2), 161–171. <https://doi.org/10.14710/jpk.7.2.161-171>
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598–606.
- Vindalia, J. I., Siregar, I., & Ramli, S. (2022). Dakwah Sunan Kalijaga Dalam Penyebaran Agama Islam Di Jawa Tahun 1470 – 1580. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 1(3), 17–25. <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.18085>
- Wahyudi, W., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2021). Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 253–266. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.98>
- Weruin, U. U. (2016). *Manusia Kebudayaan dan Masyarakat: Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Penerbit Pustaka Mandiri.
- Wirasandi. (2018). Konflik Kontestasi Aktor Intra Desa: Buah Demokrasi Minus Transformasi. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 6(1), 45–55.

- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 338–351.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>
- Zuhro, R. S. (2009). *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Ombak.

PROFIL PENULIS

Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP.



Penulis lahir di Kabupaten Sumedang pada tanggal 3 Juni 1987. Menempuh jenjang pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran pada tahun 2005-2009, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Program Studi Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran pada tahun 2011-2013, dan melanjutkan jenjang pendidikan S3 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran pada tahun 2015-2018. Saat ini tercatat sebagai dosen Kebijakan Publik pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fokus kajian penulis di bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pembangunan desa. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: kyberdian@gmail.com/
dianherdiana@uinsgd.ac.id.

MODERASI BERAGAMA DI DESA

Desa seiring dengan arus mobilitas penduduk menjadi entitas masyarakat yang heterogen mulai dari latar belakang asal usul keturunan, ekonomi, sosial, budaya sampai pada agama. Kondisi ini mendorong desa untuk dapat mengadopsi nilai-nilai yang mampu diterima semua pihak dan dijadikan landasan dalam menyelenggarakan kehidupan bersama yang harmonis, inklusif, adaptif dan moderat.

Moderasi beragama dalam konteks desa diposisikan secara dinamis sebagai bagian dari nilai dan budaya komunal yang perlu diketahui, dipahami dan dipraktikkan. Adopsi moderasi beragama di desa menjadi perwujudan dari upaya reaktualisasi akan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada dan berkembang selama ini di desa, antara lain, yaitu: religius, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah mufakat, toleransi, tenggang rasa dan kepedulian sosial.

Buku ini mengkaji bagaimana upaya adopsi nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya dalam konteks relasi sosial, tetapi dalam konteks pemberdayaan masyarakat, tata laksana pemerintahan dan pembangunan di desa, sehingga penerapan moderasi beragama menjadi penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan di desa.

Uraian moderasi beragama melalui buku ini pula diharapkan mampu mendorong pemahaman akan pentingnya membangun masyarakat madani di tingkat lokal yang berperadaban, sehingga selain akan bermanfaat bagi terwujudnya kelembagaan masyarakat unggul di desa, juga diharapkan akan mampu mendorong upaya pengembangan masyarakat madani dalam skala nasional melalui upaya pembentukan masyarakat madani di berbagai desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.